

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK,
PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN PDRB
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DIAN PRIASTIWI
NIM. 12020114140112

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dian Priastiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114140112

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH
PENDUDUK, PENDIDIKAN, UPAH
MINIMUM, DAN PDRB
TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.

Semarang, 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing,

Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.
NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dian Priastiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114140112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH JUMLAH
PENDUDUK, PENDIDIKAN, UPAH
MINIMUM, DAN PDRB
TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 05 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)
2. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan,

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dian Priastiwi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dengan rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 15 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

Dian Priastiwi
NIM. 12020114140112

ABSTRACT

Employment is an important aspect for the Indonesia's economy. One of the employment problem is unemployment. This research aims to analyze the effect of population, education, minimum wage, and Gross Domestic Regional Product (GDRP) on the visible unemployment rate in the Province of Central Java.

This research use secondary data. The analytical method used in this study is panel data regression. Panel data is a combination of cross section data that includes 35 Districts/Cities of Central Java and time series data from 2010 until 2015. The results showed that Fixed Effects Model (FEM) is the most appropriate.

Based on regression results of this research show that the number of population gives positive and significant effect for the visible unemployment rate. While education, minimum wage, and GDRP give negative and significant effect for the rate of visible unemployment. Based on simultaneous test, the number of population, education, minimum wage, and GDRP simultaneously have an impact on the visible unemployment rate.

Keywords : Visible unemployment, population, education, minimum wage, GDRP, Fixed Effects Model (FEM).

ABSTRAKSI

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data *cross section* yang mencakup 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* yaitu dari 2010 hingga 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pendidikan, upah minimum, dan PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata kunci : Pengangguran terbuka, jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, PDRB, *Fixed Effect Model*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah*”. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E, M.Si., Ph.D, selaku Ketua Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Wahyu Widodo, S.E., M.Si., Ph.D. dan Nenik Woyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali, yang turut memberikan dukungan selama masa studi.
4. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Seluruh staf, karyawan, pegawai serta seluruh civitas akademik yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP terima kasih atas seluruh bantuannya.
7. Seluruh pihak dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data untuk penelitian ini.
8. Keluarga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Bidang Perekonomian atas pengalaman magang dan bantuan dalam pengerjaan penelitian ini.

9. Orang tua tercinta, Bapak Supriyadi dan Ibu Widi Astanti untuk doa, kasih sayang, nasihat, dukungan, serta kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Kepada Adik-adik tersayang, Wildan dan Faris atas setiap doa, dukungan, dan waktu untuk berkeluh kesah.
10. Teman-teman IESP 2014, terkhusus teman seperjuangan Agustya, Afnurul, Rizma, Bella, Nia, Dwi dan masih banyak lagi terima kasih atas kerjasama, dukungan dan berbagai cerita yang diberikan kepada penulis.
11. Sahabat jauh penulis, Siti Munawaroh, untuk selalu mengingatkan target penulis dan terima kasih atas dukungan yang diberikan.
12. Keluarga Edents, terutama Magang 2014 dan HMJ IESP periode 2014 atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Serta kepada semua yang sudah berkontribusi namun secara tidak sengaja tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 Oktober 2018

Penulis

Dian Priastiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Labor/Leisure Choice.....	20
2.1.2 Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja.....	22
2.1.3 Kependudukan.....	25
2.1.4 Ketenagakerjaan	29
2.1.5 Pendidikan.....	36
2.1.6 Upah	39
2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto	43

2.2	Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen	46
2.2.1	Hubungan Jumlah Penduduk dengan Tingkat Pengangguran.....	47
2.2.2	Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Pengangguran	47
2.2.3	Hubungan Tingkat Upah dengan Tingkat Pengangguran	48
2.2.4	Hubungan PDRB dengan Tingkat Pengangguran.....	49
2.3	Penelitian Terdahulu.....	51
2.4	Kerangka Pemikiran	56
2.5	Hipotesis Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN.....		58
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	58
3.1.1	Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	58
3.1.2	Variabel Bebas (Variabel Independen)	59
3.2	Jenis dan Sumber Data	60
3.3	Metode Pengumpulan Data	61
3.4	Metode Analisis.....	61
3.4.1	Pemilihan Model Data Panel.....	65
3.4.2	Estimasi Model Regresi	67
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	68
3.4.4	Uji Hipotesis	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		77
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	77
4.1.1	Kondisi Geografi.....	77
4.1.2	Kondisi Ketenagakerjaan	78
4.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	80
4.2	Analisis Data	82
4.2.1	Estimasi Model	82
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	83
4.2.3	Uji Hipotesis	87
4.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	90
4.3.1	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	93
4.3.2	Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka ...	94

4.3.3	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	94
4.3.4	Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	95
BAB V PENUTUP.....		96
5.1	Simpulan.....	96
5.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT Indonesia Periode Agustus 2010 dan Agustus 2015	2
Tabel 1.2 Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Selama 2010 - 2015 (jiwa)	5
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Pengangguran (jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010 dan 2015.....	6
Tabel 1.4 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah 6 Provinsi di Pulau Jawa (tahun), 2010-2017	10
Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT Indonesia Periode Agustus 2014 - Agustus 2015	78
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Chow</i>	82
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	83
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	84
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	85
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Park</i>	86
Tabel 4.7 Nilai t-Statistik	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 2010 – 2015 (persen)	7
Gambar 1.2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015 (dalam persen).....	8
Gambar 2.1 Kurva Indiferens	21
Gambar 2.2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja	23
Gambar 2.3 Kurva Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja	24
Gambar 2.4 Kurva Philips Upah dan Pengangguran	43
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010 dan 2015	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Variabel Penelitian	103
Lampiran B Model <i>Fixed Effect</i>	109
Lampiran C Uji <i>Chow</i>	111
Lampiran D Uji <i>Hausman</i>	112
Lampiran E Uji Normalitas	113
Lampiran F Uji Heteroskedastisitas	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting bagi perekonomian Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang tinggi memunculkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah terkait masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 yang berjudul Statistik Indonesia 2016, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255.461.700 jiwa pada tahun 2015. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih di angka 1,38 persen per tahun. Hasil proyeksi penduduk oleh BPS, pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa di mana populasi penduduk Indonesia lebih didominasi oleh kelompok umur produktif yakni antara 15-64 tahun. Hal ini membuat Indonesia memasuki era bonus demografi di mana usia produktif dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pembangunan atau menjadi beban bagi perekonomian seperti meningkatnya pengangguran.

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Muslim (2014) menjelaskan bahwa pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Kaufman dan Hotchkiss (1999) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran efisiensi dalam perekonomian. Ketika pengangguran terjadi, beberapa input tenaga

kerja yang tersedia tidak digunakan, yang berarti hilangnya produksi. Pada tahun 2009, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 6,1 persen menjadi 4,6 persen yang berarti terjadi penurunan persentasi jumlah produksi barang dan jasa. Setelah melewati masa tersebut, pada periode 2011 – 2015 terjadi perlambatan ekonomi di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada tren penurunan tingkat pengangguran selama beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya terjadi peningkatan pengangguran pada tahun 2011. Selain dampak dari perlambatan ekonomi, populasi penduduk Indonesia yang besar memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya sehingga berdampak pada tingkat pengangguran. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Berikut diuraikan tabel status keadaan ketenagakerjaan di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT
Indonesia Periode Agustus 2010 dan Agustus 2015

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2010	2015	Perubahan
	Periode Agustus		5 Tahun (%)
Angkatan Kerja (Juta Orang)	116,53	122,38	5,02
Bekerja (Juta Orang)	108,21	114,82	6,11
Pengangguran (Juta Orang)	8,32	7,56	-9,13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK (%)	67,72	65,76	-2,89
Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT (%)	7,14	6,18	-13,45

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2010 dan 2015, BPS.

Jumlah angkatan kerja selama kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan. Angkatan kerja yang bekerja pun meningkat. Jumlah angkatan kerja yang bekerja tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja mengalami penurunan. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap pasar kerja (BPS, 2018).

Terkait masalah pengangguran, baik Indonesia maupun dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi dapat digunakan untuk mengganti tenaga kerja manusia. Berbeda dengan revolusi industri pertama hingga ketiga yang berlangsung lambat, hingga ratusan tahun, yang bermula dari penemuan mesin uap kemudian energi listrik untuk produksi massal. Penemuan teknologi informasi dan elektronik sebagai awal revolusi industri ketiga juga memerlukan waktu yang lama. Sedangkan revolusi industri 4.0 dengan teknologi digital yang mendominasi, berkembang secara cepat. Akibatnya, terjadi perubahan dalam tatanan dan sistem yang ada saat ini atau bisa disebut disrupsi. Disrupsi ekonomi bisa menyebabkan hilangnya sejumlah pekerjaan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang PS Brodjonegoro, berdasarkan simulasi yang dibuat lembaga konsultan internasional McKinsey, jika revolusi industri tingkat 4.0 itu terjadi saat ini, sebanyak 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan (CNN Indonesia, 2018). Jumlah tersebut hampir separuh dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal itu terjadi karena tenaga kerja di Indonesia masih rentan terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (39,71 persen). Diikuti status berusaha sendiri

(19,13 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (14,89 persen), dan pekerja keluarga (12,26 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,26 persen. Pada periode Agustus 2016 - Agustus 2017, terjadi peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada status berusaha sendiri (2,23 persen) dan status buruh/karyawan/pegawai (1,01 persen). Penurunan terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, dan pekerja keluarga, yaitu masing-masing sebesar 1,54 persen, 0,44 persen, dan 1,48 persen. Era ini mendorong buruh untuk berinovasi dalam penciptaan lapangan kerja sendiri. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung keseluruhan tenaga kerja Indonesia. Akibatnya, angka pengangguran masih terus meningkat.

Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada periode Agustus 2015, sebesar 32,88 persen atau 37,35 juta penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air serta mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan tersebut. Meskipun demikian, jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian turun dibanding periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 41,49 juta penduduk.

Sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi merupakan sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja disusul sektor jasa kemasyarakatan,

sosial, dan perorangan. Sebanyak 25,69 juta jiwa atau 22,37 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidup dengan bekerja di sektor perdagangan dan 15,62 persen bekerja pada sektor jasa. Untuk menjelaskan tentang penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama disajikan tabel berikut.

Tabel 1.2
Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Selama 2010 - 2015 (jiwa)

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Periode Agustus		Perubahan 5 Tahun (%)
		2010	2015	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	41.494.941	37.748.228	-9,03
2	Pertambangan dan Penggalian	1.254.501	1.320.466	5,26
3	Industri	13.824.251	15.255.099	10,35
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	234.070	288.697	23,34
5	Konstruksi	5.592.897	8.208.086	46,76
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	22.492.176	25.686.342	14,20
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.619.022	5.106.817	-9,12
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.739.486	3.266.538	87,79
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	15.956.423	17.938.926	12,42
10	Belum Jelas Batasannya	-	-	-
11	Lainnya	-	-	-
12	Tak Terjawab	-	-	-
Total		108.207.767	114.819.199	6,11

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan dan jasa cenderung mengalami kenaikan selama kurun waktu 2010 - 2015. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan pola struktur ekonomi dari pertanian ke industri kemudian jasa. Meskipun beberapa sektor nampak tinggi pertumbuhannya

tetapi ternyata penyerapan tenaga kerjanya kecil. Sebagai contoh sektor lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan yang tumbuh lebih dari 87 persen dalam kurun 5 tahun tetapi hanya menyerap 2,84 persen dari total penyerapan tenaga kerja.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar. Jawa Tengah menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 33.774.141 jiwa pada tahun 2015. Setengah dari jumlah penduduk Jawa Tengah merupakan angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja menjadi permasalahan tersendiri bagi ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010, Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah penganggur terbuka tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Berikut diuraikan Tabel 1.3 tentang perkembangan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di 6 provinsi di Pulau Jawa.

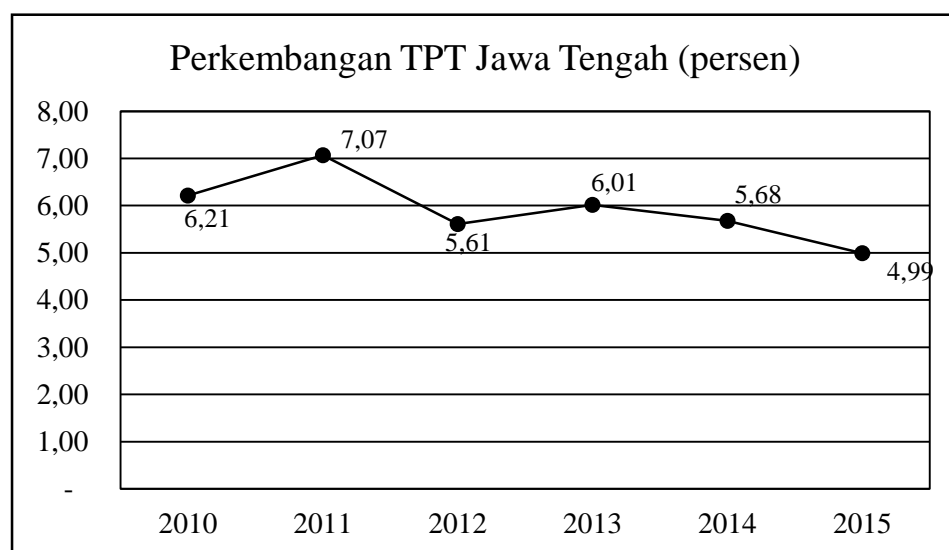
Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Pengangguran (jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010 dan 2015

Provinsi	2010		2015		Perubahan 5 Tahun (%)	
	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT	Pengangguran	TPT
Indonesia	8,319,779	7.14	7,560,822	6.18	-9.12	-13.47
DKI Jakarta	582,843	11.05	368,190	7.23	-36.83	-34.59
Jawa Barat	1,951,391	10.33	1,794,874	8.72	-8.02	-15.58
Jawa Tengah	1,046,883	6.21	863,783	4.99	-17.49	-19.60
DI Yogyakarta	107,148	5.69	80,245	4.07	-25.11	-28.50
Jawa Timur	828,943	4.25	906,904	4.47	9.40	5.37
Banten	726,377	13.68	509,383	9.55	-29.87	-30.21

Sumber: Data BPS Jawa Tengah Tahun 2018, diolah.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa TPT Jawa Tengah terbilang rendah dibanding provinsi lain tetapi jumlah pengangguran masih tinggi. Pada tahun 2010, sebesar 12,58 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia berada di Jawa Tengah.. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2010 – 2015 terjadi tren penurunan yang signifikan baik pada tingkat pengangguran terbuka maupun jumlah penganggur. Untuk memperjelas bahasan disajikan Gambar 1.1 mengenai grafik perkembangan TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 -2015.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 2010 – 2015 (persen)

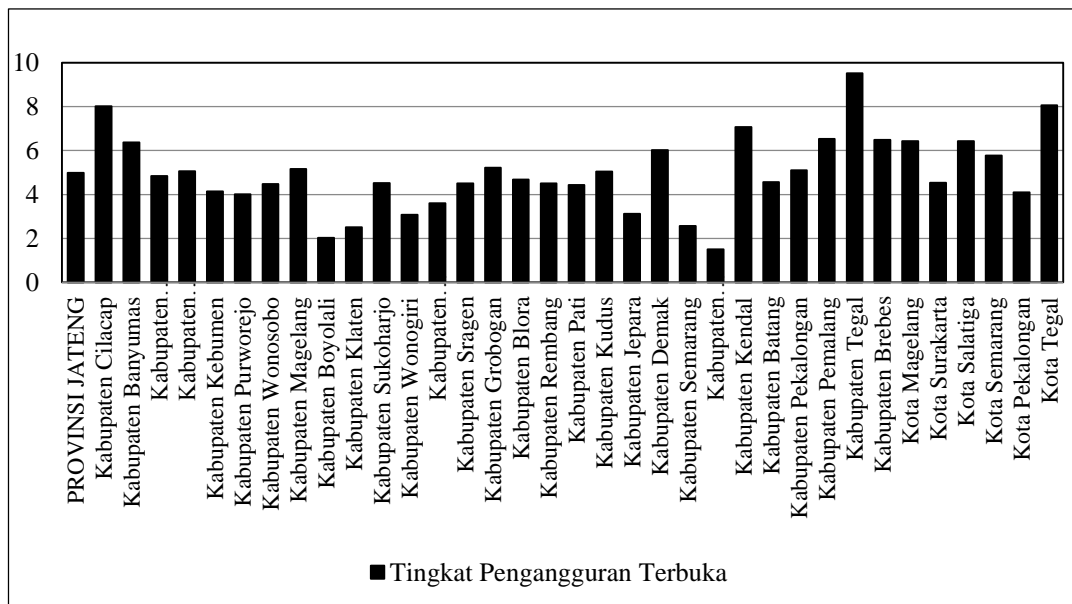


Sumber: Data BPS Jawa Tengah Tahun 2018, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 – 2015 berfluktuasi namun secara keseluruhan mengalami penurunan. Kaufman & Hotckiss (1999) menyebutkan tingkat pengangguran adalah kunci dari kinerja perekonomian. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang bekerja dapat naik dalam waktu yang sama. Misalnya pada

tahun 2010, TPT Jawa Tengah sebesar 6,21 persen dan naik menjadi 7,07 persen pada 2011. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja juga naik sebanyak 13.318 orang. Penjelarasnya, bahwa pertumbuhan tenaga kerja baru lebih besar dari penyediaan lapangan kerja baru yang ada. Hal ini berarti, meskipun tren TPT menurun, tetapi masalah pengangguran masih penting. TPT tertinggi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdapat pada Kabupaten Tegal yaitu sebesar 9,52 persen. Berikut disajikan grafik TPT menurut kabupaten/kota.

Gambar 1.2
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015 (dalam persen)



Sumber: Data BPS Jawa Tengah Tahun 2018, diolah.

Salah satu faktor penyebab tingkat pengangguran tinggi adalah kondisi di mana jumlah angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk yang bekerja. Menurut Panjawa dan Soebagiyo (2014) dan Firdhania dan Muslihatinningsih (2017), jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Panjawa dan Soebagiyo menambahkan, jumlah penduduk yang

terus meningkat, menyebabkan banyak penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja. Berbeda halnya jika angkatan kerja yang meningkat akan menyebabkan kesempatan kerja juga meningkat. Apabila tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru, maka akan banyak penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan/pengangguran. Berdasarkan Gambar 1.2, Kabupaten Tegal memiliki TPT tertinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Diperkirakan jumlah pengangguran yang tinggi disebabkan jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja yang tersedia sangat tidak sebanding. Sedangkan TPT Kabupaten Temanggung merupakan yang terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,5 persen. Hal ini berarti Kabupaten Temanggung telah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang ada.

Proporsi angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah memiliki tren yang sama dengan nasional di mana jumlah pekerja didominasi tamatan pendidikan rendah seperti SMP, SD, hingga pekerja tidak tamat SD. Namun, jumlah pekerja yang tidak tamat SD di Jawa Tengah mulai berkurang tiap tahunnya bahkan terjadi pula peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan universitas. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa mulai adanya perbaikan di bidang pendidikan. Peningkatan bidang pendidikan juga dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah. Berikut disajikan tabel tentang perkembangan rata-rata lama sekolah di 6 provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.4
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah 6 Provinsi di Pulau Jawa (tahun),
2010 - 2015

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INDONESIA	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84
DKI Jakarta	10,37	10,4	10,43	10,47	10,54	10,7
Jawa Barat	7,4	7,46	7,52	7,58	7,71	7,86
Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,8	6,93	7,03
D I Yogyakarta	8,51	8,53	8,63	8,72	8,84	9
Jawa Timur	6,73	6,79	6,85	6,9	7,05	7,14
Banten	7,92	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berdasarkan Tabel 1.4, rata-rata lama sekolah Jawa Tengah menjadi yang terendah diantara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. RLS penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2015 mencapai 7,03 tahun. Angka ini menunjukkan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 2 SMP (Kelas VIII). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014 menunjukkan, sebagian besar penduduk Jawa Tengah yang tidak/belum pernah sekolah ataupun terpaksa berhenti bersekolah, disebabkan karena faktor tidak ada biaya. Mereka terpaksa berhenti bersekolah karena harus bekerja/mencari nafkah. Sedangkan penduduk perempuan, masih ada yang memilih untuk menikah dan mengurus rumah tangga daripada meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian, dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan. Jika rata-rata lama sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

Permasalahan lain dari ketenagakerjaan Indonesia adalah terkait upah. Menurut Panjawa dan Soebagiyo (2014), tingkat upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang didapat sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Besaran upah yang dibayarkan biasanya berdasarkan kesepakatan atau mengikuti undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, pengertian upah tertuang pada Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah minimum ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap buruh/pekerja. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penetapan UMP dilakukan sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015. Besaran nilai UMP berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional. Selanjutnya, diikuti oleh pengumuman Pemerintah Provinsi terkait UMP di daerahnya masing-masing. Sebelum PP Nomor 78 Tahun 2015 berlaku, perhitungan UMP dihitung sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang tidak menetapkan UMP dan hanya

menetapkan Upah Minimum Kota (UMK). Rata-rata UMK di Jawa Tengah naik 14,96 persen. UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar 1.685.000 rupiah, UMK paling rendah di Kabupaten Cilacap wilayah Barat dan Banyumas yaitu 1.100.000 rupiah.

Faktor lain menurut studi sebelumnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung adalah PDRB. Muslim (2014) berpendapat PDRB meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya dalam pembangunan merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada penambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Muslim, 2014).

Bonus demografi dan era revolusi industri 4.0 yang tengah dihadapi Indonesia rentan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Teori Samuelson dan

Nordhaus (dalam Panjawa&Soebagiyo, 2014) menyatakan angka pengangguran yang tinggi berarti menyia-nyiakan produksi barang dan jasa yang sebenarnya mampu diproduksi oleh pengangguran. Jika tidak segera di atasi, persoalan inilah yang akan berdampak pada pembangunan Indonesia sendiri, sehingga perlu dipelajari hal-hal yang dapat mempengaruhi pengangguran untuk menemukan solusinya. Penelitian ini akan membahas pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran. Jumlah penduduk dan pendidikan dipilih sebagai faktor dari sisi penduduk itu sendiri, seperti preferensi terhadap pendidikan, yang akan diuji pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran.

Jumlah Penduduk merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada penelitian sebelumnya. Panjawa dan Soebagiyo (2014) dan Firdhania dan Muslihatinningsih (2017) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan Muslim (2014) meneliti dengan cakupan lebih sempit yaitu menggunakan jumlah angkatan kerja dan hasilnya sepakat dengan kedua peneliti sebelumnya. Jika jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja naik, maka tingkat pengangguran juga akan naik. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan kerja yang ada tidak dapat menampung tenaga kerja secara keseluruhan.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan kelak. Menurut Muslim (2014), setidaknya masyarakat yang telah mengenyam pendidikan setelah selesai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih berkelas di sektor formal. Semakin lama jangka waktu yang masyarakat habiskan untuk

mendapatkan pendidikan maka semakin tinggi atau bermartabat pula pekerjaan yang mereka dapatkan dan semakin terhindar mereka dari masalah pengangguran. Dalam penelitiannya, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Upah minimum merupakan faktor yang mengaitkan kepentingan kedua pihak. Panjawa dan Soebagiyo (2014) mengatakan upah menjadi hal yang penting baik bagi produsen maupun pekerja. Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan dengan efisien. Bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya, keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Studi Aruan dan Sriyono (2014) menyimpulkan bahwa upah tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Firdhania dan Muslihatinningsih (2017) dalam studinya mengatakan jika upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Sementara berdasarkan penelitian Panjawa dan Soebagiyo (2014) diketahui upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Di mana kenaikan upah minimum akan menyebabkan peningkatan pengangguran di objek studi. Penyebab terjadinya pengangguran akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian sampai di titik ekuilibrium, di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, PDRB menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Kaufman dan Kotchkiss (1999) hubungan antara tingkat GDP yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran didasarkan pada Hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji

hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat GDP suatu negara atau daerah. Hukum Okun menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan PDRB di suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut juga akan meningkat yang berdampak pada penurunan jumlah pengangguran. Hasil penelitian sebelumnya, Panjawa dan Soebagiyo (2014) dan Muslim (2014) memiliki hasil yang sama yaitu PDRB yang juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan hasil studi Hartanto dan Masjkuri (2017) menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, jumlah pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2015, sebanyak 7,56 juta angkatan kerja masih menganggur. Angka ini turun dibanding 5 tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010 – 2015 berfluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan dari 6,21 persen pada 2010 ke 4,99 persen pada 2015. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 7,07 persen. Kaufman & Hotchkiss (1999) menyebutkan tingkat pengangguran adalah kunci dari kinerja perekonomian. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Penyediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Penurunan tingkat pengangguran menjadi indikator yang baik bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menambah tenaga kerja dianggap berhasil menaikkan produksi dan penjualan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang bekerja dapat naik

dalam waktu yang sama. Misalnya pada tahun 2010, TPT Jawa Tengah sebesar 6,21 persen dan naik menjadi 7,07 persen pada 2011. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja juga naik sebanyak 13.318 orang. Penjelasan, bahwa pertumbuhan tenaga kerja baru lebih besar dari penyediaan lapangan kerja baru yang ada. Hal ini berarti, meskipun tren TPT menurun, tetapi masalah pengangguran masih penting. Terbukti bahwa lebih dari 800.000 angkatan kerja Jawa Tengah pada tahun 2015 masih merupakan pengangguran.

Pada studi-studi sebelumnya, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh. Sedangkan upah dan PDRB pada penelitian sebelumnya berpengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang kemudian memunculkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.
3. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan, berisi latar yang membahas tentang keadaan angkatan kerja di Indonesia, penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, perkembangan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 6 provinsi di Pulau Jawa, TPT tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata lama sekolah dan kondisi pengupahan. Rumusan masalah yang membahas dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian dan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan. Serta sistematika penulisan mencakup uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab yang ada pada skripsi.

BAB II merupakan telaah pustaka, menyajikan *grand theory* mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja yang kemudian didukung teori lain seperti teori kependudukan, ketenagakerjaan, upah dan PDRB. Bab ini juga berisi teori mengenai hubungan tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, akan disajikan penelitian terdahulu yang melandasi pembentukan kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III merupakan metode penelitian, berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah dalam kurun waktu 2010 - 2015 dengan metode analisis regresi data panel.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi Provinsi Jawa Tengah, analisis deskriptif tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan analisis data dengan menggunakan model *fixed effect* yang menjelaskan estimasi serta pembahasan yang menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup, memuat simpulan hasil analisis data dan pembahasan, dalam bagian ini juga saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.